

**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN PRANCIS  
BERDASARKAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**



**DIAJUKAN OLEH:**

**MUHAMMAD SYAUQI HIDAYATULLAH**

**1810211210067**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juli 2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN

# PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN PRANCIS BERDASARKAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Diajukan oleh

**MUHAMMAD SYAUQI HIDAYATULLAH**

**NIM. 1810211210067**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2025 dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**

Diketahui,

Banjarmasin, 21 Juli 2025

**Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,**



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP.198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN PRANCIS  
BERDASARKAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD SYAUQI HIDAYATULLAH**

**NIM. 1810211210067**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor:

Tanggal:

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP.197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 14 Juli 2025  
Dengan susunan panitia penguji

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.  
Sekretaris : M. Ali Amrin, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. HJ. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mnagkurat

Nomor: 721/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal: 11 Juli 2025

## MOTO

Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang (**Ir. Soekarno**)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kusayangi;

### **Ayahanda dan Ibunda terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Akhmad Rifani** dan **Arisphyanti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua....

### **Kakak dan adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta **Ikhlasul Amal** dan adikku tersayang **Siti Aisyah**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat di butuhkan, semoga kalian kelak menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua....

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Ibu **Erlina** atas bimbingan dan asihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua....

## RINGKASAN

Muhammasd Syauqi Hidayatullah. Juli 2025. **PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN PRANCIS BERDASARKAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik, yang kemudian dikenal dengan NKRI. Indonesia memiliki pusat pemerintahan yang terletak di Jakarta, sekaligus merupakan ibu kota negara. Bahasa resmi negara Indonesia adalah bahasa Indonesia dan memiliki mata uang berbentuk Rupiah, sedangkan Prancis adalah negara kesatuan berbentuk republik yang pusat pemerintahannya terletak di Paris, sebagai ibu kota negara. Bahasa resmi dari negara Prancis adalah bahasa Prancis, dan memiliki mata uang berbentuk Euro.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap perbandingan hukum. Tipe penelitian ini digunakan dengan maksud mengkaji perbandingan di dalam struktur dan substansi hukum dari objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dengan bahan hukum dianalisa secara kualitatif, yang artinya data diuraikan dengan kalimat yang runtun, logis dan tidak tumpang tindih, dengan maksud mempermudah pemahaman dan interpretasi data dari bahan hukum yang dianalisa.

Baik Indonesia maupun Prancis sama-sama mengalami banyak perubahan dalam struktur ketatanegaraan, dari konstitusi yang ditegakkan, sistem pemerintahan dan juga pengaturan otonomi daerah. Indonesia menerapkan sistem presidensial pada masa berlakunya UUD NRI 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa Konstitusi RIS dan UUDS adalah sistem parlementer, dan pada masa diberlakukannya kembali UUD NRI 1945, Indonesia kembali menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Begitupun demikian dengan Prancis yang mengalami beberapa kali perubahan yang mempengaruhi sistem pemerintahan di negara tersebut. Sejak diberlakukannya Konstitusi 1958 bahkan hingga sekarang, Prancis menerapkan sistem pemerintahan semi-presidensial. Terkait dengan otonomi daerah di Indonesia, didasari atas pembagian wilayah dan landasan pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan sistem desentralisasi di Prancis lebih menekankan pada pengaruh dari pemerintah pusat, dengan beberapa tingkat pemerintah di Prancis.



Muhammad Syauqi Hidayatullah. Juli 2025. **PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN PRANCIS BERDASARKAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik, yang kemudian dikenal dengan NKRI. Indonesia memiliki pusat pemerintahan yang terletak di Jakarta, sekaligus merupakan ibu kota negara. Bahasa resmi negara Indonesia adalah bahasa Indonesia dan memiliki mata uang berbentuk Rupiah, sedangkan Prancis adalah negara kesatuan berbentuk republik yang pusat pemerintahannya terletak di Paris, sebagai ibu kota negara. Bahasa resmi dari negara Prancis adalah bahasa Prancis, dan memiliki mata uang berbentuk Euro.

Dalam sebuah praktik kenegaraan, ada sistem pemerintah yang diterapkan. Indonesia menerapkan sistem presidensial, sedangkan Prancis menerapkan sistem semi presidensial. Terkait dengan otonomi daerah di Indonesia, didasari atas pembagian wilayah dan landasan pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan sistem desentralisasi di Prancis lebih menekankan pada pengaruh dari pemerintah pusat, dengan beberapa tingkat pemerintah di Prancis.

**Kata Kunci** (keyword): Sistem Pemerintahan, Otonomi Daerah, Indonesia, Prancis

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga di curahkan selaku kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku pembimbing utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting dalam memberikan masukan dan sarana keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai karya ilmiah, karena itu dengan peuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dala rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

**Muhammad Syauqi Hidayatullah**

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>BAB I</b> .....   | 1  |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....   | 1  |
| <b>A. Latar Belakang</b> .....   | 1  |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....  | 3  |
| <b>C. Keaslian Penelitian</b> .....  | 3  |
| <b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....   | 3  |
| <b>E. Metode Penelitian</b> .....  | 4  |
| <b>F. Sistematika Penulisan</b> .....  | 7  |
| <b>BAB II</b> .....  | 8  |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....  | 8  |
| <b>A. Hukum Tata Negara</b> .....  | 8  |
| <b>B. Perbandingan Hukum Tata Negara</b> .....   | 10 |
| <b>C. Jenis-jenis Sistem Pemerintahan</b> .....  | 11 |
| <b>D. Konsep Otonomi Daerah</b> .....  | 15 |
| <b>BAB III</b> .....   | 18 |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....   | 18 |
| <b>A. Sistem Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia dan Prancis</b> .....        | 18 |
| <b>B. Perbandingan Sistem pemerintahan dan Otonomi Daerah Di Indonesia dan Prancis</b> | 42 |
| <b>BAB IV</b> .....  | 47 |
| <b>PENUTUP</b> .....   | 47 |
| <b>A. Simpulan</b> .....   | 47 |
| <b>B. Saran</b> .....  | 47 |

## DAFTAR RUJUKAN

## RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR SINGKATAN

|      |   |
|------|---|
| EU   | : <i>European Union</i>                     |
| G7   | : <i>Group Of Seven</i>                     |
| KNIP | : Komite Nasional Indonesia Pusat           |
| NATO | : <i>North Atlantic Treaty Organization</i> |
| PBB  | : Perserikatan Bangsa-Bangsa                |
| RIS  | : Republik Indonesia Serikat                |

## **DAFTAR TABEL**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Tabel 1.1. Model Sistem Pemerintahan Indonesia berdasarkan periode berlakunya konstitusi di Indonesia .....</b> | <b>21</b> |
| <b>Tabel 1.2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen</b>                                  | <b>26</b> |
| <b>Tabel 1.3. Lembaga Yudikatif Sebelum dan Sesudah Amandemen .....</b>  | <b>28</b> |
| <b>Tabel 1.4. Perkembangan Bentuk Pemerintahan Prancis Sejak 1789 .....</b>  | <b>37</b> |